

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat heterogenitas tinggi karena kemajemukan yang ada sangat kompleks dalam berbagai aspek yang meliputi suku, tradisi, agama, kebudayaan, cara hidup, pandangan maupun pilihan politik yang dianut oleh masyarakat. Menurut teori terdapat empat macam indikator kemajemukan yaitu kemajemukan ideologis (perbedaan mengenai kepercayaan), kemajemukan politis, kemajemukan kultural, dan kemajemukan structural. Konsep kemajemukan tersebut tercermin di Kelurahan Kranggan Kabupaten Ambarawa Jawa Tengah, masyarakat Kelurahan ini sangat majemuk karena terdapat lima kelompok umat agama yang berbeda seperti Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Konghucu, berbagai etnis seperti etnis Tionghoa, Jawa, Madura, memiliki latar kebudayaan, pilihan politik dan profesi yang beragam. Atas keragaman tersebut setiap kelompok memiliki kebutuhan untuk mengembangkan solidaritas dalam kelompoknya, namun yang menjadi persoalan bagaimana kelompok tersebut mengekspresikan identitasnya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak mengganggu kelompok lain dengan adanya keanekaragaman yang ada dibutuhkan adanya sikap saling menghormati dan saling menyesuaikan diri antara unsur-unsur yang berbeda.

Keragaman dapat dipandang sebagai sebuah dinamika kekuatan positif dan konstruktif, jika masyarakat dapat menerjemahkannya bukan sebagai sebuah realitas social empiric tetapi berganti menjadi suatu realitas alamiah. Namun keragaman tersebut dapat dipandang sebagai sebuah kekuatan yang negatif dan destruktif apabila tidak dikelola dengan baik (Huat, 2014). Salah satu aspek dari sumber ketegangan masyarakat adalah heterogenitas hal tersebut dapat melunturkan ikatan bersama. Masyarakat yang mejemuk berpotensi untuk mengalami konflik karena mereka melakukan identifikasi kultural dan cenderung terbagi kedalam kelompok berdasarkan identitasnya masing-masing, identifikasi tersebut yang menentukan individu termasuk dalam ingroup atau outgroup (Durkheim dalam Soekanto, 1990)

Berdasarkan konsep Coleman dan Rosberg dalam kajiannya mengenai politik heterogenitas di Indonesia mengidentifikasi bahwa pembelahan secara horizontal yang berakar pada perbedaan ras ,suku dan agama lebih menonjol dari pada dimensi vertical yaitu antara elit dan massa (Nazaruddin, 1989). Menurut data yayasan Denny JA dalam gerakan Indonesia tanpa diskriminasi terhitung sejak 14 tahun setelah reformasi terdapat 2.398 kasus diskriminasi serta kekerasan yang terjadi di Indonesia. Dari keseluruhan jumlah tersebut 65 persen merupakan kekerasan berlatarbelakang agama kemudian 20 persen yang lain merupakan kasus kekerasan etnis disusul 15 persen kekerasan gender dan 5 persen sisanya merupakan kasus kekerasan orientasi seksual. Persebaran konflik komunal berdasarkan pemberitaan di media massa menunjukkan bahwa dominan terjadi di daerah dengan kategori

perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan luas wilayah geografis kecil atau pada skala local. (Januar, 2014)

Timbulnya kasus tersebut akibat heterogenitas yang tinggi di Indonesia sehingga isu agama, perang antar suku hingga isu etnis pribumi non-pribumi (Tionghoa) tidak dapat terelakkan. Konflik tersebut akan semakin kompleks jika timbul adanya perbedaan pemahaman yang dicampuri atau didukung oleh aspek lain yaitu politik dan ekonomi. Ada banyak contoh konflik politik identitas seperti yang baru-baru ini terjadi ketersinggungan terhadap sensitivitas etnis dan agama yang menimbulkan konflik dan ketidak harmonisan antar pemeluk agama, mulai terasa tegang sejak munculnya kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama memancing kemarahan dari sejumlah pihak situasi tersebut menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap etnis dan keyakinan seorang minoritas. Berkembangnya isu etnis dan agama mulai digunakan kelompok tertentu dalam upaya memenangkan kontestasi politik bahkan di tingkat nasional yang dapat berpotensi memecah belah bangsa dan menimbulkan polarisasi dalam masyarakat.

Untuk itu pemerintah membutuhkan adanya pendekatan perencanaan social (*social planning approach*) sebuah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk memahami serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang dianut sehingga dapat melahirkan rasa saling menghormati dan mampu hidup secara berdampingan dalam kemajemukan (Mudzar, 2006). Pemerintah harus menyadari bahwa civil society memiliki peran dalam menjaga persatuan bangsa karena bagaimanapun stabilitas negara akan terganggu apabila warga negaranya saling

mengedepankan kepentingan atas identitas kelompok, kerukunan dalam masyarakat majemuk merupakan factor yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas demi mendukung jalannya program pembangunan nasional. Kerukunan dalam konteks tersebut bukanlah penyeragaman karena masyarakat masih memiliki latar belakang atau identitas masing-masing namun bentuk kerjasama antar masyarakat dalam mewujudkan keserasian dan keharmonisan dalam suatu system yang menghasilkan kesepakatan nilai yang di junjung tinggi bersama.

Terdapat sebuah pandangan mengenai penanganan konflik komunal yang dapat dicegah dengan menggunakan kerangka kerja demokrasi politik karena melalui hal tersebut perbedaan yang ada dianggap dapat diselesaikan secara damai. Demokrasi memiliki keterkaitan dengan teori *civic engagement* Varshney yang mengatakan bahwa melalui lingkungan yang demokratis, masyarakat sipil dapat berkembang dalam hubungan interkomunal. Jika konflik muncul hal tersebut dapat dicegah dengan meregulasikan dan diselesaikannya melalui metode yang menekankan terciptanya perdamaian. Menurut penelitian yang dilakukan Yayasan SETARA Institute pada tahun 2017 meskipun konflik komunal terutama konflik keagamaan masih terjadi hingga saat ini namun frekuensinya menurun. Hal tersebut didasari dengan adanya inisiatif oleh lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah dalam aspek regulasi maupun program guna meningkatnya terciptanya kedamaian atau kerukunan. Sebagai contoh pada tahun 2017 Wahid Foundation yang menginisiasi pembentukan kampung damai pada tiga provinsi di Indonesia, yakni Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat. Program tersebut dibentuk

berdasarkan pemahaman bahwa kerukunan dan perdamaian dapat terbentuk jika masyarakat mampu mandiri dan kuat secara ekonomi.

Pemerintah juga menciptakan suatu inovasi kebijakan melalui identifikasi permasalahan yang dapat menimbulkan perpecahan dan konflik komunal yaitu dibentuknya program desa sadar kerukunan yang dimulai pada tahun 2017. Sebanyak 34 desa di Indonesia dimana masing-masing provinsi terdapat 1 desa/kelurahan yang menjadi pilot project program tersebut salah satu diantaranya termasuk di Kelurahan Kranggan yang mewakili provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini program tersebut telah dilaksanakan secara bertahap diberbagai daerah di Indonesia guna mempertahankan zero konflik sekaligus menjadikan desa/kelurahan tersebut sebagai percontohan bagi wilayah disekitarnya.

Program desa sadar kerukunan ini merupakan program unggulan Kementerian Agama yang diciptakan dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia mandiri ,berdaulat dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong yang memiliki sasaran program peningkatan kerukunan intra dan antar umat beragama. Berdasarkan tujuan tersebut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi berkoordinasi dengan sector ditingkat kabupaten untuk membangun kawasan sadar kerukunan di tingkat desa/kelurahan. Ruang lingkup dalam pelaksanaan program tersebut meliputi penetapan lokasi, pembentukan kader kerukunan umat beragama, dan penyebarluasan informasi dalam bentuk kegiatan dialog, seminar, diklat teknis, FGD, workshop, lokakarya maupun sosialisasi. Konstruksi perdamaian yang terbangun di desa sadar kerukunan merupakan bahasan yang menarik dan penting

bagi peneliti karena hal tersebut merupakan suatu hal yang actual mengingat berbagai isu permasalahan yang hadir saat ini. Berdasarkan asumsi dan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk menggali informasi mengenai bagaimana konstruksi perdamaian yang terbangun di Kelurahan Kranggan.

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang lokasi ini dipilih karena dapat menggambarkan miniature kehidupan multicultural di Indonesia dengan tingkat keberagaman masyarakatnya yang tinggi. Peneliti mencoba melihat perbedaan dalam masyarakat Kelurahan Kranggan sebagai sebuah realitas politik yang harus dikelola secara demokratis yaitu mensyaratkan pentingnya hubungan yang setara dan saling memahami. Perbedaan tersebut dikerucutkan dalam tiga aspek yaitu etnis, agama dan pilihan politik yang ada secara lebih mendalam, ketiga hal tersebut dipilih karena peneliti berasumsi bahwa ketiga aspek tersebut merupakan perbedaan yang paling mencolok dan lebih berpotensi menimbulkan konflik dibanding aspek lain selain itu pembatasan aspek dilakukan agar penelitian lebih terstruktur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana keterlibatan warganegara dalam membangun konsensus perdamaian di desa sadar kerukunan Kelurahan Kranggan ?
2. Bagaimana integrasi elit dalam implementasi pembinaan program desa sadar kerukunan di Kelurahan Kranggan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis rumusan masalah yang telah disusun peneliti untuk melakukan riset yang berjudul Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit : Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis keterlibatan warganegara dalam membangun konsensus perdamaian di desa sadar kerukunan Kelurahan Kranggan
2. Mendeskripsikan integrasi elit dalam implementasi pembinaan program desa sadar kerukunan di Kelurahan Kranggan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya riset di bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan khususnya mengenai pengembangan kajian teoritis konflik dan damai yang berkaitan dengan teori *civic engagement* menurut Ashutosh Varshney dan teori integrasi elit menurut Tadjoeeddin dalam membangun konsensus perdamaian masyarakat heterogen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai consensus perdamaian yang dibangun di desa sadar kerukunan agar proses maupun nilai baik yang ada dapat menjadi contoh untuk pelaksanaan program di daerah lain, adapun kekurangannya dapat menjadi bahan pembelajaran dalam mewujudkan

perdamaian komunal ditengah masyarakat heterogen yang diharapkan dapat menekan angka konflik. Hasil penelitian ini juga diharapkan berkontribusi bagi kebijakan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan komunal di Indonesia.

1.5 Tinjauan Literatur

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan riset sehingga penulis dapat memperluas pandangan dalam melaksanakan penelitian dengan tema serupa. Berdasarkan pengamatan kepustakaan yang peneliti lakukan belum ada yang melakukan riset mengenai “Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit : Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang”. Namun terdapat penelitian yang relevan, hanya saja focus kajian, objek dan teori yang digunakan berbeda. Peneliti merangkum beberapa riset yang digunakan sebagai referensi dalam menambah wawasan serta memperkaya pembahasan penelitian sebagai berikut.

Pada penelitian yang dilakukan Ahnaf dan Aziz yang berjudul Mengelola Keragaman dari Bawah, Koeksistensi Santri-Tionghoa di Lasem, Jawa Tengah dalam penelitian ini Ahnaf dan Aziz menggunakan teori Tadjoeeddin mengenai integrasi elit dan menemukan fakta bahwa *civic engagement* di Lasem tidak cukup kuat untuk meredam konflik yang ada karena latar belakang masyarakat Lasem merupakan santri yang cenderung mengikuti perkataan Kyai ini berpotensi merusak *civic engagement* jika Kyai yang berpengaruh tidak lagi mendukung koeksistensi Jawa-Cina. Keberadaan tokoh Muslim dan tokoh Cina yang pro-integrasi Lasem mempunyai pengaruh cukup kuat dalam memperjuangkan pembauran antar Muslim

dan etnis Cina dan mendukung terciptanya integrasi massa. Teori kedua yang digunakan yaitu teori Luc Reyckler mengenai lima factor situasi damai sebagai berikut : (1) Saluran komunikasi, (2) *Peace-enhancing institution*, (3) Lingkungan sosial yang integrative, (4) *Supportive regional and international environment*, (5) Tokoh masyarakat pendukung perdamaian. Berbagai factor dapat di modifikasi sesuai kondisi dan situasi objek studi (Ahnaf dan Aziz, 2012).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pritti M.K. Rana yang berjudul *Ethnic Peace in Malaysia* penelitian ini menggunakan teori *intercommunal civic engagement* untuk menjelaskan upaya pencegahan konflik antara etnis Melayu dan Tionghoa. Pada Tahun 1967 dan 1969 ketika terjadi krisis ekonomi di Malaysia aksi demonstrasi masyarakat secara besar-besaran menjalar dan berimbas menjadi kekerasan etnis dimana etnis Tionghoa menjadi objek kekerasan. Namun kekerasan etnis tersebut tidak nampak lagi sekitar tahun 1980-1990 meskipun situasinya sama. Menurut data yang Pritti M.K. Rana dapatkan hal tersebut terjadi karena meningkatnya *interethnic civic engagement* antara etnis Melayu dan Tionghoa dalam sektor ekonomi (Rana, 2012).

Penelitian juga dilakukan oleh Doddy Iskandar dengan judul *Kedamaian Komunal dan Peran Masyarakat Sipil Sunni dan Syiah di Pematang Jaya Jawa Tengah*. Penelitian ini menggambarkan inter-sectarian antara masyarakat Sunni dan Syiah serta mencari faktor terjadinya interaksi dan kerjasama diantara mereka. Doddy menggunakan *civil society* yang dikembangkan oleh Ashutosh Varshney selain itu ia juga menggunakan teori modal sosial yaitu bonding, bridging dan linking untuk

mengidentifikasi peran politik. Dari penelitian tersebut didapatkan fakta bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kedamaian komunal antara Sunni dan Syiah di Pemalang yaitu adanya jaringan, karakteristik personal dalam kepemimpinan, serta peran pemerintah local. (Iskandar, 2016)

Berbagai penjelasan tersebut merupakan riset-riset yang menggunakan teori civic engagement dan integrasi elit yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sehingga dapat digunakan sebagai pembanding dan kajian pustaka untuk penulisan skripsi ini agar konsistensi pembahasan dan orisinalitasnya tetap terjaga dengan begitu berdasarkan telaah pustaka tersebut tidak terdapat kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena peneliti mengambil objek, wilayah, dan isu yang berbeda.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Civic Engagement

Penelitian ini menggunakan teori *civic engagement* menurut Ashutosh Varshney, *civic engagement* dapat diartikan sebagai kondisi dimana masyarakat berpartisipasi secara kolektif atas kehidupan mereka berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki untuk melakukan perubahan demi berkontribusi memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat agar lebih baik. Teori *Social Capital* merupakan cikal bakal dari terbentuknya teori *Civiv Engagement* dengan focus kajian mengenai ciri-ciri organisasi sosial, seperti: jaringan (*network*), norma (*norms*) dan kepercayaan (*trust*) yang mengakomodir terciptanya koordinasi yang baik untuk suatu tujuan

bersama. Robert Putnam mengemukakan pentingnya *civic network* dalam bukunya *Making Democracy Work*, ia menggunakan teori ini untuk memberikan gambaran mengenai fenomena Italia utara & Italia selatan yang memiliki perbedaan pola *social capital*. Italia Utara menunjukkan *civic network* yang lebih kuat dibanding Italia Selatan hal tersebut mempengaruhi keberhasilan pemerintahan regional dalam implementasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien (Putnam, 1992).

Dapat disimpulkan bahwa *civic network* adalah salah satu unsur terpenting dalam *social capital* hal ini terjadi karena pada dasarnya warga negara merupakan kumpulan dari individu-individu yang saling terikat sehingga terciptalah sikap saling pengertian dimana warga negara dapat mengatur kebijakan mereka sendiri. Semakin kuat *civic network* maka akan semakin memungkinkan terjadinya koordinasi dalam meredam potensi konflik, hal tersebut juga dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan antar personal yang memungkinkan setiap individu mendapatkan citra positif mengenai komunitas lain (Syah, 2002).

Robert Putnam dan Ashutosh Varshney memiliki prinsip yang sama mengenai pentingnya hubungan warga negara dalam *civil society*, namun kedua teori tersebut memiliki perbedaan. Putnam memakai istilah “civic networks” sedangkan Varshney menggunakan istilah “networks of engagement”. Putnam tidak mempersoalkan adanya perbedaan antara etnik sedangkan Varshney menjadikan ethnics sebagai poin penting dalam kajiannya. Putnam menganggap bahwa *mono-ethnic* akan berpotensi meningkatkan *social capital*, sedangkan Varshney mempercayai bahwa hal tersebut akan menciptakan eskalasi kekerasan komunal karena penelitian

Varshney berfokus pada perlintasan antar etnik dalam civil society. Dapat disimpulkan bahwa Varshney melakukan pendalaman dan kontekstualitas terhadap konsep yang dibangun oleh Putnam.

Ashutosh Varshney mengembangkan konsep *civic engagement* dalam bukunya yang berjudul *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslim in India* (2002). *Civic engagement* dipahami sebagai partisipasi publik yakni terbentuknya jaringan antar masyarakat. Teori *civic engagement* ini dikembangkan berdasarkan pengamatan empiris di India mengingat tingginya kekerasan komunal disana yang masih berlangsung hingga saat ini namun kekerasan tersebut tidak terlokalisasi dalam artian tidak merata di seluruh negeri. Hal tersebut diamati selama tujuh tahun studi mendalam dimana secara sistematis Varshney membandingkan tiga kota dengan intensitas kerusuhan yang tinggi antara Hindu-Muslim dan tiga kota lainnya yang terhindar dari kerusuhan agar mendapatkan formula yang tepat. Berdasarkan penelitiannya di kota yang tergolong damai, beberapa konflik kecil memang terjadi namun frekuensi dan penyebarannya berhasil dibatasi sehingga kedamaian komunal dapat bertahan dengan adanya jaringan *inter-communal* disana.

Istilah komunal dipergunakan dalam ranah politik dan konflik yang didasarkan atas pengelompokan identitas keagamaan, kesukuan, sectarian, kelas sosial, afiliasi politik, maupun hanya perbedaan kampung. Secara teori terdapat dua ranah *civic engagement* yaitu *inter-communal* dan *intra-communal* hal tersebut memiliki fungsi dan penanganan yang berbeda sesuai dengan ranah konfliknya. Fokus dari penelitian Varshney yaitu pada asosiasi yang bersifat *inter-communal*

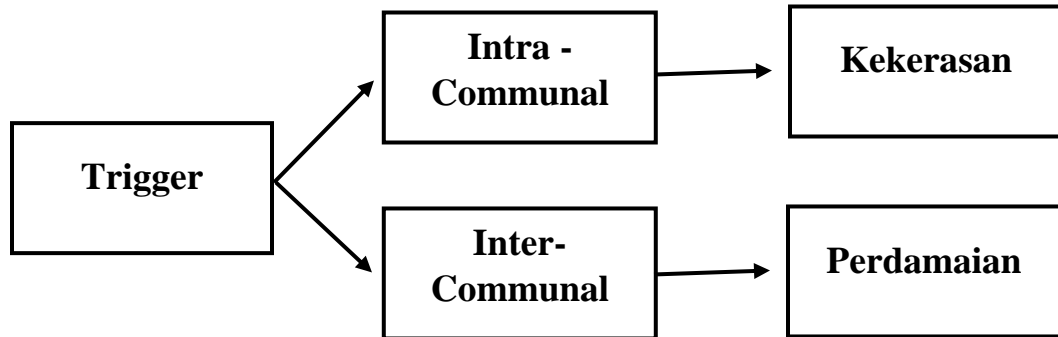
dan didapati bahwa hubungan yang kuat antar struktur komunitas plural dalam konteks Hindu-Muslim berpengaruh terhadap terciptanya perdamaian komunal seperti berikut ini :

“Interethnic networks are agent of peace, but if communities are organized only along intraethnic lines and the interconnection with other communities are very weak or even nonexistent, then ethnic violence is quite likely.(Varshney, 2002)”

Sementara dalam pola ikatan intra-communal jaringan yang terbentuk hanya berdasarkan kesamaan tertentu, mereka menjalani komunikasi secara intensif berdasarkan komunal sehingga terbentuk jaringan eksklusif yang memungkinkan mereka menutup diri atas kelompok komunal lain justru semakin mempertegas sekat antar komunitas. Karena tidak adanya interaksi maupun komunikasi interkomunal yang baik, ikatan ini cenderung berpotensi menimbulkan konflik ketika terjadi provokasi atau rumor antar komunitas.

Peneliti menggunakan ranah *inter-communal* karena relevan dengan lokasi studi kasus yang digunakan, merupakan kriteria masyarakat heterogen yang berbeda keyakinan, agama maupun pilihan politik namun berada dalam satu wilayah administrasi yang dibranding dengan sebutan desa sadar kerukunan dirasa tepat dikaji menggunakan teori tersebut yang dapat menjelaskan bagaimana jaringan interkomunal yang ada membentuk kerukunan di wilayah tersebut. Berikut merupakan bagan yang dapat menggambarkan kekerasan dan perdamaian dalam masyarakat heterogen menurut Varshney :

Bagan 1.1
Kekerasan dan Perdamaian Kelompok



Sumber : Varshney (2002)

Selain pembagian diatas Varshney membagi lagi *civic engagement* menjadi dua sifat yaitu pertama ikatan keseharian (*quotidian*) melalui aktivitas rutin yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Hubungan Sosial : kerja bakti, kegiatan PKK maupun dawis, kegiatan jual-beli, mengadakan suatu kegiatan bersama
2. Hubungan Ketetanggaan : saling kunjung antar individu yang berbeda unsur, memberikan makanan
3. Hubungan Sosial Keagamaan : berpartisipasi bersama dalam perayaan keagamaan.

Sedangkan yang kedua dalam bentuk formal / structural (*asosiasional*) yaitu berupa aktifitas masyarakat yang terorganisir seperti organisasi bisnis, komunitas budaya, paguyuban profesi, serikat buruh, dan partai politik. Varshney mengatakan bahwa ikatan *quotidian* mampu membawa kerukunan di pedesaan india karena

tingginya intensitas interaksi antar masyarakat namun hal tersebut sulit terjadi pada masyarakat perkotaan yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan sibuk dengan kepentingannya masing-masing. Atas dasar itulah ikatan *asosiasional* dirasa mampu mengakomodir kepentingan yang tidak terpenuhi dalam interaksi keseharian dan dirasa lebih kuat terutama ketika ada aktor-aktor tertentu yang berupaya mempolarisasi dan memprovokasi komunitas untuk kepentingan politis melalui berbagai isu seperti agama maupun ras dapat terbandung oleh kepentingan yang mengikat.

Menurut pengamatannya konflik terjadi hanya ada di wilayah kota-kota tertentu di India yang banyak memiliki asosiasi *intra-communal* hal tersebut merujuk pada eksklusivisme menurut etnik dan agama yang mendorong terjadinya mobilisasi masa untuk melakukan kekerasan atau kerusakan. *Civic engagement* merupakan jaringan yang bersifat non-kenegaraan namun dapat bersifat politis contohnya serikat buruh dan partai politik yang bukan merupakan kaki tangan negara namun dapat mengakomodir kegiatan bersifat sosial. *Civic engagement* memiliki tiga klasifikasi yang harus dipenuhi yaitu :

1. Posisinya ada diantara warga negara dan negara dimana warga negara dapat melakukan segala bentuk kegiatan publik secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah.
2. Dapat menciptakan hubungan antara individu dengan individu maupun masyarakat.
3. Mandiri dalam artian keberadaannya tidak bergantung secara operasional kepada negara.

1.6.2 Integrasi Elit

Teori integrasi elit dapat dipahami sebagai suatu kesepakatan yang terjadi pada elit dari berbagai kelompok. Teori ini merupakan pendapat kritis Tadjoeeddin terhadap teori Varshney yang menonjolkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Menurut pengamatan Tadjoeeddin dalam konteks sosial politik di Indonesia jika *civic engagement* belum efektif dalam meredam konflik integrasi elit memiliki potensi yang lebih besar karena Indonesia memiliki budaya patron-client yang kuat di mana jika fragmentasi di kalangan elite terjadi maka akan berimbas dan dirasakan oleh pengikut mereka, hal tersebut dapat dikonversi menjadi kekerasan di antara anggota komunitas yang berbeda. Konflik atau gesekan di tingkat elit seharusnya dapat diselesaikan dengan baik di antara para elit itu sendiri namun ada beberapa oknum elit yang justru memainkan peran dalam memprovokasi pengikutnya.

Elite dalam teori ini merupakan elit non politik yaitu seseorang yang menduduki jabatan strategis yang memiliki pengaruh dalam lingkup masyarakat contohnya seperti elite keagamaan, kepemudaan, elit organisasi kemasyarakatan, profesi dan sebagainya. Tadjoeeddin mendefinisikan elit menjadi dua yaitu elit terintegrasi dan elit terfragmentasi. Elit terintegrasi merupakan suatu kondisi dimana terdapat suatu nilai consensus ada diantara para elit yang didukung oleh kerja sama dan rasa saling percaya antara kelompok yang berbeda dan ada jaringan inklusif dan interaksi pribadi yang luas di antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Jika kedua syarat tersebut tidak dapat ditemukan maka dapat dikatakan bahwa elit terfragmentasi.

Berdasarkan pengamatan reflektif yang dilakukan Tadjoeudin mengenai bagaimana mekanisme integrasi elit bekerja di Indonesia data menunjukkan terdapat dominasi dua tren integrasi elit yang ada di Indonesia yaitu tingginya segregasi komunitas di Indonesia, dan dominasi budaya paternalistik dalam masyarakat. Berikut ini merupakan bukti empiris konsep integrasi elit :

- (1) Perjanjian Damai Malino I, Kesepakatan Damai Malino II dan inisiatif Baku Bae dalam menyelesaikan konflik di Ambon dan Maluku merupakan contoh mekanisme integrasi elit dapat menciptakan ruang untuk membangun konsensus nilai dimana terjadi interaksi pribadi antar para elit yang digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan komunal, ketika muncul isu negative para elit agama akan dengan mudah berkomunikasi dan mengklarifikasi isu untuk kemudian meluruskan informasi kepada pengikutnya.
- (2) Pembentukan Forum Komunikasi Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur (FKPMKT) pada awal 1998 oleh beberapa etnis yaitu Jawa, Bugis, Banjar, dan Dayak yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kekerasan etnis di wilayah tersebut pasca meningkatnya ketegangan politik nasional sebelum era lengsernya presiden Suharto.
- (3) Dialog antar agama merupakan sebuah forum untuk mengembangkan konsensus nilai dan hubungan sipil di antara para elit dari berbagai agama. Contohnya fragmentasi yang terjadi antara dua elit organisasi berbasis massa

Islam terbesar yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang berupaya menggulingkan Abdurrahman Wahid atas kepemimpinannya menyebabkan konflik kekerasan di akar rumput. Basis konstituen NU di Jawa Timur menunjukkan kemarahannya dengan merusak properti milik Muhammadiyah.

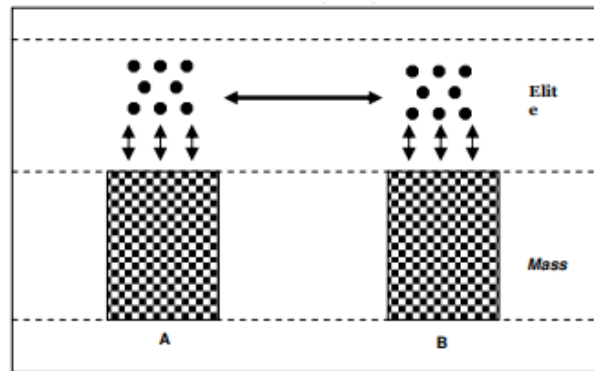
Berbagai penelitian dilakukan untuk mempelajari sejauh mana mekanisme integrasi elit memainkan peran dalam mengendalikan konflik komunal. Penelitian di Poso menunjukkan bahwa integrasi massa / *civic engagement* tidak cukup kuat untuk mencegah konflik, jika faktor pemicu tersebut berasal dari luar. Walaupun masyarakat Muslim dan Kristen di Poso datang dari desa yang sama namun mereka saling bertarung padahal masing-masing kelompok mengakui secara historis hubungan mereka cukup harmonis. Mereka saling mengundang satu sama lain dalam acara sosial bahkan saling membantu membangun atau merenovasi masjid dan gereja. Hal tersebut disebabkan tidak adanya integrasi elit yang dapat mengontrol pengikut dari masing-masing komunitas.

Integrasi elit harus dipahami secara substantive bahwa interaksi sosial di kalangan elit melalui pertemuan informal yang intim belum tentu mencerminkan integrasi massa namun integrasi elit masih diharapkan memainkan peran penting dalam membangun pemahaman bersama dan saling percaya antar kelompok. Ketika elit mengalami integrasi maka terbangun jaringan horisontal di antara elit yang berbeda komunitas dan pada saat yang sama dapat mempermudah arus informasi dan proses komunikasi yang dikembangkan secara vertical antara elit dan pengikut

atau massa mereka. Mekanisme tersebut berkontribusi besar terhadap pencegahan kekerasan antar-komunal. Berikut merupakan bagan hubungan elit dengan massa :

Bagan 1.2

Integrasi Elit



Sumber : Jurnal Politics Administration & Change, Tadjoeeddin (2004)

Sikap saling percaya dan menghargai konsensus terbentuk di antara para elit dari berbagai tingkatan dan kepentingan yang berbeda. Integrasi elit dapat dipahami melalui dua perspektif yaitu koordinasi elit (*elite coordination*) dan pembagian kekuasaan (*consociational*). Koordinasi elit ditafsirkan sebagai komponen penting dari mekanisme kebijakan diri antar elit sedangkan pembagian kekuasaan merupakan kompromi di antara elit dari kelompok komunal yang bersaing (Tadjoeeddin, 2004). Contohnya provinsi Sulawesi Utara menciptakan kebijakan pembagian kekuasaan karena sebagian besar masyarakatnya beragama Kristen dan sebagian lainnya Muslim, beberapa posisi unit pemerintah dialokasikan untuk birokrat Muslim. Hal ini merupakan upaya agar masyarakat Muslim-Kristen memiliki hubungan yang baik di daerah tersebut.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian yang mengambil judul mengenai Analisis Keterlibatan Masyarakat dan Integrasi Elit : Studi Kasus Program Desa Sadar Kerukunan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Peneliti memilih tiga perbedaan yang akan dianalisis lebih lanjut yaitu perbedaan etnis, agama dan pilihan politik, ketiga aspek tersebut dipilih karena menurut penulis hal tersebut merupakan hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat pembatasan aspek tersebut juga dilakukan agar penelitian lebih terstruktur. Riset ini akan di kaji dengan menggunakan beberapa teori yaitu teori Ashutosh Varshney (2001) mengenai *civic engagement* yang digunakan untuk melihat jaringan interkomunal yang terbentuk melalui interaksi keseharian maupun organisasi/komunitas yang ada di kelurahan Kranggan. Teori kedua yang digunakan penulis yaitu teori integrasi elit menurut Zulfan Tadjoeuddin (2004) yang digunakan untuk melihat apakah integrasi elit yang terbentuk melalui FKUB berpengaruh terhadap implementasi pembinaan program desa sadar kerukunan.

1.8 Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah yang dipilih secara mendetail untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam sebuah riset guna mendapatkan data dengan suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Ada empat aspek yang harus diperhatikan dalam metode penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan (Sugiyono, 2010). Metode penelitian dikategorikan menjadi tiga, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan *mix-methods*. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memperhatikan, pandangan, pendapat, gagasan atau entitas yang diyakini oleh masyarakat yang seluruhnya berbentuk kalimat deskriptif kompleks yang tidak dapat diukur menggunakan angka.

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau desain penelitian riset studi (*case-study*) peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata melalui system terbatas kontemporer (kasus), poin pentingnya yaitu mengidentifikasi suatu kasus yang spesifik berupa entitas yang konkret seperti individu, kelompok kecil, komunitas, organisasi, kemitraan, proses keputusan atau proyek yang spesifik (Yin, 2009). Tujuan utama pemilihan pendekatan ini yaitu untuk memahami isu atau problem secara spesifik, dalam konteks penelitian ini kasus yang akan dieksplorasi yaitu mengenai adanya program desa sadar kerukunan di kelurahan Kranggan termasuk entitas yang bersangkutan dalam program tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data lapangan yang detail dan mendalam dengan menggunakan berbagai metode pengambilan data yakni wawancara, pengamatan, dokumen dan laporan yang akan dijelaskan lebih lanjut disub bab selanjutnya.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi atau tempat diadakannya suatu penelitian. Penetapan lokasi ini disesuaikan dengan tujuan dan objek sasaran penelitian sehingga peneliti akan memudahkan peneliti untuk mengobservasi fenomena yang ada secara spesifik. Penelitian ini mengambil lokasi di lingkup wilayah Kelurahan

Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang karena merupakan pilot project program desa sadar kerukunan di Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dimaknai sebagai informan atau sasaran penelitian, yang berarti responden penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang relevan dengan focus penelitian (Moleong, 2010). Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian menurut penulis adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara yaitu :

1. Bapak M. Subchan Yawawi SH selaku Lurah Kranggan
2. Bapak KH Sinwani selaku Kepala Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Semarang
3. Bapak WS Liem Ping An selaku tokoh agama Konghucu sekaligus anggota FKUB Jawa Tengah
4. Ibu Eti Herawati selaku pengurus FKUB Kelurahan Kranggan sekaligus ketua RW 07
5. Bapak Syamsul Nur Rizal selaku perwakilan warga pendatang dari Aceh
6. Bapak Bambang Prakoso selaku ketua paguyuban rukun kematian sekaligus ketua RW
7. Bapak Teguh Sugiono selaku ketua RW 03

1.8.4 Jenis Data

Dalam riset ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaknai sebagai suatu riset untuk menjelaskan fenomena dalam suatu subjek

penelitian. Penjabaran riset ini menggunakan bentuk deskriptif atau kata-kata yang merepresentasikan fenomena atau gejala sosial dengan sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat (Denzin, Norman K. & Lincoln, 2011). Penggunaan metode ini dirasa sesuai dengan riset yang dilakukan peneliti karena dapat menjelaskan suatu fenomena secara lebih detail dan mendalam sehingga penyampaiannya lebih mudah dipahami pembaca.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data utama dalam metode penelitian kualitatif diwujudkan dalam tindakan dan kata-kata, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 1989, p. 112). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau sumber pertamanya yaitu wawancara melalui narasumber atau responden sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data yang relevan untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Hal ini dilakukan agar mengetahui secara mendalam dan lebih spesifik mengenai fenomena yang terjadi di desa sadar kerukunan Kelurahan Kranggan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang relevan dengan penelitian ini seperti yang sudah peneliti sebutkan pada bagian subjek penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh oleh peneliti sebagai penunjang sumber data primer yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data dari buku referensi, laporan, jurnal, dokumen, data laporan dan studi literatur lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga/instansi yang terkait seperti data Badan Pusat Statistika mengenai angka penduduk, kondisi geografis wilayah maupun informasi yang mendukung lainnya, data Panitia Pemungutan Suara mengenai jumlah suara pada PEMILU tahun 2019 di Kelurahan Kranggan.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 langkah yaitu wawancara dan observasi lapangan yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara bebas terpimpin (Arikunto, 2013) pertanyaan diajukan secara bebas bersifat, tidak terstruktur dan sifatnya terbuka namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat sehingga mendapatkan pandangan narasumber yang dapat memudahkan peneliti dalam pengembangan pertanyaan pada saat melakukan wawancara. Responden penelitian ini meliputi aparaturnya kelurahan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, dan masyarakat Kelurahan Kranggan di berbagai perkampungan agar dapat menjadi informasi pembandingan yang saling berkaitan kemudian

wawancara juga akan dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam menunjang penelitian tersebut.

2. Observasi Terbatas

Observasi kualitatif merupakan kegiatan peneliti untuk turun langsung ke lapangan mengamati perilaku dan aktivitas individu maupun kelompok di lokasi penelitian (Cresswell, 2016). Hal ini merupakan upaya untuk memperkuat hasil wawancara. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Kranggan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

1.8.7 Analisis dan Intrepretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses pengaturan atau pengorganisasian data, mencari dan memilah temuan penting untuk membentuk suatu pola maupun kategori dalam suatu uraian dasar berupa temuan untuk kemudian dapat dipublikasikan (Neuman, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yang terdiri dari beberapa 3 langkah penting menurut ahli (Miles, 1992) yang akan dijabarkan yakni sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian guna menyederhanakan, pengabstrakan, dan tranformasi data mentah yang muncul dari data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan. Dalam reduksi data diperlukan langkah sebagai berikut:

- a. Pengkategorisasian Data yaitu mengolah data lapangan sesuai dengan kriteria atau indikator yang diciptakan peneliti dalam kerangka konsep hingga sedemikian rupa untuk mempertajam kajian peneliti.
- b. Penjabaran Data yaitu proses menganalisa data yang didapat dari informan mengenai topik penelitian secara rinci agar penjelasannya lebih dipahami oleh pembaca.

2. Display (Penyajian Data)

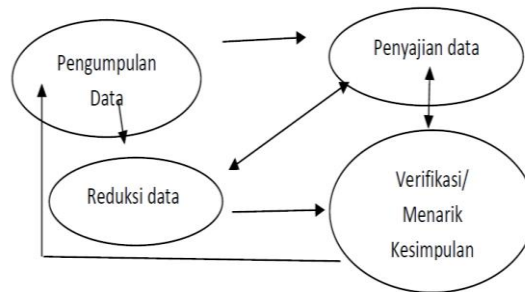
Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan cara menuliskan data yang telah diperoleh di lapangan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah peneliti memahami secara praktis. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Peneliti akan menyajikan data yang telah diperoleh yang akan dikaitkan dengan teori-teori relevan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Pengorganisasian data tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu sehingga memudahkan peneliti dalam merencanakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian.

3. Verifikasi Data (Menarik Kesimpulan)

Langkah terakhir peneliti dalam menganalisis data adalah pengujian keabsahan data melalui 2 aspek yaitu validitas internal yang merupakan kebenaran dan validitas eksternal mencakup penerapan, reliabilitas (konsistensi) dan obyektifitas. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditatrik

kesimpulan yang dimaknai sebagai mencari, arti, makna dan menjelaskan apa yang disusun secara singkat dan general agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian.

Bagan 1.4
Analisis Data



Sumber : Analisis data menurut Mathew B.Miles dan A. Michel Huberman

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ilmu sosial validitas sangat diperlukan dalam menguatkan kualitas keakuratan dan keabsahan data dari penelitian yang diambil. Validitas merupakan kesesuaian data yang diperoleh peneliti dari narasumber atau informan dengan fakta yang terjadi di lapangan atau objek penelitian (Sugiyono, 2010). Data dapat dinyatakan valid apabila sesuai dengan fakta yang ada dilapangan pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data yaitu peneliti akan melakukan pengecekan terhadap data yang telah didapat dengan cara membandingkan melalui sumber lain seperti halnya membandingkan keterangan dari FKUB Kabupaten Semarang, pengurus FKUB kelurahan maupun pihak masyarakat terkait implementasi program tersebut.